**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**A. Literature Review**

 Literatur review berisi uraian tentang teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Uraian dalam literatur review diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan pada perumusan masalah. Penelusuran pustaka merupakan langkah pertama untuk mengumpulkan informasi yang relevan bagi penelitian. Penelusuran pustaka berguna untuk menghindarkan duplikasi dari pelaksanaan penelitian. Penelusuran pustaka untuk mengetahui penelitian yang pernah dilakukan. Literatur review dilakukan dengan cara membaca, memahami, mengkritik, dan mereview literatur dari berbagai macam sumber. Tinjauan literatur sangat penting peranannya dalam membuat suatu tulisan ataupun karangan ilmiah. Tinjauan literatur memberikan ide dan tujuan tentang topik penelitian yang akan kita lakukan. Literatur review berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka tentang topik yang dibahas. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain dapat juga dimasukkan sebagai pembanding dari hasil penelitian. Semua pernyataan dan/atau hasil penelitian yang bukan berasal dari penulis harus disebutkan sumbernya, dan tatacara mengacu sumber pustaka mengikuti kaidah yang ditetapkan. Landasan teori, tinjauan teori, tinjauan pustaka semuanya merupakan cara untuk melakukan tinjauan literatur. (Setyono, 2019)

1. **Nadia Potabuga, 2018, Diplomasi Indonesia-Malaysia Melalui Joint Working Group Dalam Penyelesaian Outstanding Boundary Problem Di Sungai Simantipal, Kalimantan Utara, Universitas Pasundan Bandung.**

Dalam skripsi yang ditulis oleh Nadia Potabuga ini membahas tentang sengketa perbatasan yang telah terjadi antara Indonesia dengan Malaysia. Merupakan sengketa yang sudah lama dimulai dan belum menemukan kesepakatan bersama tentang 9 sektor wilayah yang masih berstatus Outstanding Boundary Problem (OBP) atau wilayah yang masih dipermasalahkan tentang batas – batasnya yang ada di Pulau Kalimantan. lokasi yang diteliti yaitu pada sektor timur OBP di sungai Simantipal, Kecamatan Lumbis Ogong, Kalimantan Utara. Dimana dalam proses negosiasi menuju kesepakatan bersama tentang garis batas wilayah antara kedua negara telah dilakukan dengan cara diplomasi yang kemudian dibentuk suatu pertemuan Joint Working Group yang bersifat bilateral khusus untuk membahas masalah – masalah garis batas diwilayah Kalimantan – Malaysia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan mendeskripsikan tentang upaya diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Malaysia dalam menyelesaikan OBP di sungai Simantipal, serta memahami bagaimana permasalahan perbatasan yang sebenarnya terjadi di pulau Kalimantan tersebut yang penyelesaiannya tergolong memakan waktu yang cukup lama. Sedangkan manfaat dari penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan pengembangan ilmu Hubungan Internasional khususnya dibidang Diplomasi dan Kerjasama Internasional. Serta untuk para pembuat keputusan terutama di Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode deskriptif dan historis, dengan menganalisis data-data atau informasi terdahulu dan relevansinya dengan data – data yang terbaru dan kemudian di deskripsikan atau dijelaskan dengan cara mengumpulkan, menyusundan menginterpretasikan data. Dalam hal ini yaitu perkembangan diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Malaysia terkait penyelesaian OBP di sungai Simantipal. Kemudian untuk hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, diplomasi yang dilakukan Indonesia terhadap Malaysia untuk menetapkan batas – batas yang jelas antara kedua negara ini, masih belum menemukan kesepakatan yang bersifat permanen/terikat antar kedua negara,dikarenakan adanya perbedaan interpretasi peta yang di buat dari perjanjian Belanda – Inggris antara Indonesia dan Malaysia yang menjadikan proses negosiasi ini menjadi makin kompleks. Dari pembentukan awal forum Joint Working Group tahun 2010 sampai dengan saat ini,pihak Malaysia masih mempermasalahkan wilayah OBP sungai Simantipal, walaupun tim teknis dari kedua negara sudah melakukan pengukuran dilapangan yang disesuaikan dengan Agreement 1915 yang menjadi landasan hukum penyelesaian di sungai Simantipal, mendapati kesamaan kondisi bentang alam yang berarti wilayah tesebut adalah bagian dari teritorial Indonesia.

Penulis dan referensi membahas hal yang serupa dan dalam lingkup wilayah yang sama yaitu sungai Simantipal, yang membedakan adalah bahwa hal ini sudah merupakan suatu bentuk kerjasama yang MoUnya sudah ditanda tangani kedua belah pihak dan kini menyisakan 7 Outstanding Boundary Problem diluar sungai Simantipal dan titik C500-C600 yang dinyatakan telah selesai pada JIM ke 42 yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal 8-11 Oktober 2018

**2. Rizky Ihsan, 2019, Sengketa Batas Darat dan Diplomasi Perbatasan Indonesia terhadap Malaysia, *Analisis CSIS***

Dalam jurnal yang ditulis oleh Rizky ihsan ini membahas persoalan sengketa batas darat (*Outstanding Boundary Problems*) antara Indonesia dan Malaysia di Sektor Timur dan Sektor Barat Pulau Kalimantan. Kedua negara memiliki perbedaan persepsi terhadap perjanjian wilayah yang disepakati oleh Inggris dan Belanda di sembilan titik, antara lain di
Pulau Sebatik, Segmen Sungai Sinapad, Sungai Simantipal, Titik B2700-B3100, C500-C600 di Sektor Timur, serta kawasan Batu Aum, Sungai Buan/Gunung Jagoi, Gunung Raya serta Titik D400 di Sektor Barat Pulau Kalimantan. Isu ini telah mengemuka sejak berakhirnya peristiwa konfrontasi Indonesia-Malaysia dan tengah memasuki tahap perundingan batas wilayah yang secara rutin dilakukan oleh kedua negara. Namun demikian, hingga saat ini, proses tersebut belum berhasil mencapai kesepakatan mengenai zona perbatasan secara definitif, sementara pemerintah telah memiliki komitmen politik untuk melakukan percepatan penyelesaian sengketa di wilayah perbatasan negara. Tulisan ini berargumen bahwasanya delegasi Indonesia perlu memiliki skala prioritas mengenai perundingan wilayah perbatasan Indonesia- Malaysia di perbatasan pulau Kalimantan, terutama yang berkaitan dengan nilai strategis tiap-tiap wilayah sengketa. Menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP), analisis mengenai isu teritorial dapat dilakukan. Pembobotan terhadap kawasan dapat memberikan gambaran komprehensif bagi tim delegasi perundingan mengenai urgensi tiap-tiap wilayah sengketa.

Sedangkan penulis membahas kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia melalui penanda tanganan *MoU* *forum bilateral Joint Indonesia-Malaysia Committee (JIM) on Demarcation and Survey of International Boundary,* pada 10 Oktober 2018 yang lalu.

**3. Rafli Aditya, 2017, Peran Pemerintah Indonesia-Malaysia Dalam Mengelola Perbatasan Negara Di Kawasan Barat Kalimantan (Entikong-Sarawak), Universitas Pasundan Bandung**

Dalam skripsi yang ditulis oleh Rafly Aditya ini membahas tentang perbatasan negara memiliki peran penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, dan keamanan demi keutuhan wilayah negara. Pentingnya kerja sama pengelolaan wilayah perbatasan di Kalimantan Barat antara Pemerintah Indonesia dengan Malaysia didasarkan atas pertimbangan bahwa selain pelanggaran keimigrasian, kejahatan pembalakan kayu liar (*Illegal Logging*), kejahatan jual beli manusia (*Human Trafficking*) cenderung semakin meningkat baik dalam arti kualitas maupun kuantitas. Serta adanya ketimpangan standar hidup secara sosial ekonomi dan kesejahteraan yang terjadi di antara masyarakat Indonesia dengan Malaysia sangat berbeda, terkadang menimbulkan berbagai gangguan ketertiban dan keamanan yang secara tidak langsung juga dapat menggangu hubungan baik antar kedua negara. Untuk mencegah timbulnya gangguan tersebut, diusulkan agar dilakukan peningkatan kerja sama pengelolaan kawasan perbatasan, utamanya lewat kerja sama Sosek Malindo dan beberapa langkah lain yang diyakini dapat meningkatkan dan juga menjaga kawasan perbatasa kedua negara dalam menyelesaikan berbagai konflik secara damai.

Hal yang membedakan penulis dengan referensi adalah wilayah pembahasan dan teori yang digunakan, dimana penulis lebih condong kearah Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia – Malaysia dalam penyelesaian permasalahan perbatasan yang terjadi.

**B. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori berisi uraian tentang telaahan teori dan hasil penelitian terdahulu yang terkait. Telaahan ini bisa dalam arti membandingkan, mengkonstruksikan atau meletakan kedudukan masing-masing dalam masalah yang sedang diteliti, dan pada akhirnya menyatakan posisi atau pendirian peneliti disertai dengan alasan-alasannya. Dan bukan bermaksud untuk memamerkan teori dan hasil-hasil penelitian ilmiah para pakar terdahulu dalam satu adegan verbal sehingga pembaca “diberitahu” mengenai sumber tertulis yang telah dipilih oleh peneliti. Hal ini juga dimaksudkan untuk menampilkan mengapa dan bagaimana teori hasil penelitian para pakar terdahulu digunakan peneliti dalam penelitiannya, termasuk dalam merumuskan asumsi-asumsi dalam penelitiannya.(Koentjaraningrat, 1990:65)

Hubungan Internasional yang menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia, pada hakekatnya membentuk tiga pola, yaitu kerjasama *(cooperation)*, persaingan *(competition)*, dan konflik *(conflict)* antar negara yang satu dan yang lainnya. Maka dari itu, Hubungan Internasional adalah studi tentang interaksi yang terjadi antar negara-negara yang berdaulat di dunia, terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehinga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara menutup diri terhadap dunia luar.

Untuk mengatasi konflik internal maupun konflik eksternal, dibutuhkan suatu kerjasama internasional, suatu negara yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara lain di era globalisasi sekarang ini. Sehingga dibutuhkan kerjasama internasional negara-negara yang memiliki kepentingan tersebut. Maka dari itu, pengertian Hubungan Internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antara beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional dan penggunaan politik dalam pencapaian kepentingan suatu negara, seperti yang dijabarkan oleh **Ahmad Dahlan Nasution**, sebagai berikut:

**Secara analitik, hubungan internasional itu menunjukkan dua teori, yaitu tindakan yang berurusan dengan sebuah negara dalam tindakan-tindakannya, dan teori interaksi yang memperlihatkan hubungan antar bangsa. Teori tindakan merupakan politik luar negeri, sedangkan teori interaksi merupakan kajian dari politik internasional.**(Nasution, 1991:13)

Definisi Hubungan Internasional menurut **Mc. Clelleand** adalah sebagai berikut:

**Hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan tertentu termasuk studi tentang keadaan-keadaan yang relevan yang mengelilingi interaksi.**(Clelleand, 1981:27)

Selanjutnya **KJ Holsti** lebih memperjelaskan istilah hubungan internasional sebagai berikut:

**Istilah Hubungan Internasional akan berkaitan dengan segala bentuk interaksi di antara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara. Pengkajian Hubungan Internasional, termasuk di dalamnya pengkajian terhadap politik luar negeri atau politik internasional, dan meliputi segala segi hubungan di antara berbagai negara di dunia meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, palang merah internasional, pariwisata, transportasi komunikasi dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional.**(Holsti, 1987:26)

Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama merupakan interaksi yang paling penting karena pada hakikatnya manusia tidaklah bisa hidup sendiri tanpa orang lain sehingga ia senantiasa membutuhkan orang lain. Kerja sama dapat berlangsung manakala individu-individu yang bersangkutan memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kesadaran untuk bekerja sama guna mencapai kepentingan mereka tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh **Dougherty& Pflatzgraff**, sebagai berikut:

**Kerjasama merupakan serangkaian hubungan yang tidak didasari oleh kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti pada organisasi internasional. Kerjasama terjadi karena adanya penyesuaian perilaku oleh para aktor sebagai respon dan antisipasi terhadap pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor lain.** (Dougherty dan Pflatzgraff, 1997:418)

Kerja sama diakui sebagai sebuah ikatan antar dua atau lebih pihak atau aktor dengan tujuan yang sama. Proses kerja sama yang lebih spesifik dalam Ilmu Hubungan Internasional seringkali dikenal dengan istilah Administrasi Internasional. Sedangkan wadah yang menjadi tempat bekerja sama melaksanakanadministrasi internasional, dikenal Organisasi Internasional. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh **May Rudy**, yaitu :

**Pola kerja sama yang melintasi batas- batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas danlengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan sertadisepakati bersama, baik antara pemerintah dan pemerintah, maupun antara sesama kelompok non-pemerintah dari negara-negara yang berbeda.**(Rudi, 1998)

Saat ini, sebagian besar transaksi dan interaksi antar negara dalam system Internasional sekarang bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik. Barbagai jenis masalah nasional, regional, ataupun global yang bermunculan memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Dalam kebanyakan kasus yang terjadi, pemerintah saling berhubungan dengan mengajukan alternatif pemecahan, perundingan atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menopang pemecahan masalah tertentu dan mengakhiri perundingan dengan membentuk suatu perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan bagi semua pihak. Proses seperti ini biasa disebut kerjasama atau kooperasi.

K.J. Holsti dalam bukunya Politik Internasional suatu kerangka analisis mengemukakan :

**“Kerjasama Internasional secara sederhana dapat dirumuskan sebagai suatu proses diantara negara-negara yang saling berhubungan secara bersama-sama melakukan pendekatan untuk mencari pemecahan terhadap masalah yang dihadapi melalui pendekatan satu sama lain. Mengadakan pembahasan dan perundingan mengenai masalahmasalah tersebut, mencari kenyataan-kenyataan teknis (faktor-faktor) yang mendukung jalan keluar tententu dan mengadakan pereundingan untuk perjanjian-perjanjian berdasarkan saling pengertian antara kedua belah pihak”** (Holsti, 1988:65)

Kerjasama dapat berlangsung dalam berbagai konteks yang berbeda. Kebanyakan hubungan dan interaksi yang berbentuk kerjasama terjadi lansung diantara dua pemerintah yang memiliki kepentingan atau menghadapi masalah yang sama secara bersamaan.

Menurut K.J. Holsti dalam buku Politik Internasional : Suatu Kerangka Teoritis, ada beberapa alasan mengapa negara melakukan kerjasama dengan negara lainnya:

1**. Demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya, dimana melalui kerjasama dengan negara lainnya, negara tersebut dapat mengurangi biaya yang harus ditanggung dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena keterbatasan yang dimiliki negara tersebut;**

 **2. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya;**

**3. Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama;**

**4. Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain** (Holsti, 1995: 362-363).

Meskipun dewasa ini dapat diurutkan berbagai bidang kerjasama internasional, pada hakekatnya dapat dikemukakan empat bentuk kerjasama internasional, yaitu :

1. Kerjasama Universal (global)

Kerjasama internasional yang bersifat universal atau global dapat dikembalikan pada hasrat untuk memadukan semua bangsa di dunia dalam suatu wadah yang mampu mempersatukan mereka dalam cita-cita bersama, dan menghindari disintegrasi internasional;

2. Kerjasama Regional

Merupakan kerjasama antarnegara yang berdekatan secara geografis. Yang amat menentukan pada kerjasama regional adalah kedekatan geografis. Namun, pengamatan menunjukkan, bahwa faktor itu saja belum memadai untuk memajukan suatu kerjasama regional. Kesamaan pandangan politik dan kebudayaan, atau perbedaan struktur produktivitas ekonomi dari negara-negara yang hendak bekerja sama banyak menentukan apakah suatu kerjasama regional dapat diwujudkan;

3. Kerjasama Fungsional

Dalam kerangka kerjasama fungsional, negara-negara yang terlibat masing-masing diasumsikan mendukung fungsi tertentu sedemikian rupa sehingga, kerjasama itu akan melengkapi berbagai kekurangan pada masing-masing negara. Fungsi yang didukung masing-masing negara tersebut disesuaikan dengan kekuatan spesifik dari negara lainnya. Kerjasama yang fungsional bertolak dari cara berpikir yang pragmatis yang memang mensyaratkan kemampuan tertentu pada masing-masing mitra kerjasama. Artinya, suatu kerjasama yang fungsional tidak mungkin terselenggara jika ada di antara mitra-mitra kerjasama tersebut tidak mampu mendukung suatu fungsi yang spesifik yang sebenarnya diharapkan darinya;

4. Kerjasama Ideologis

Dalam kerangka hubungan internasional, kelompok kepentingan yang paling relevan adalah negara. Namun, bagi perjuangan atau kerjasama ideology, batas teritorial justru menjadi tidak relevan. Dewasa ini, hal tersebut berlaku bagi berbagai kelompok kepentingan yang berusaha untuk mencapai tujuannya dengan memanfaatkan berbagai kemungkinan yang terbuka dalam forum global. Meskipun demikian, berbagai kelompok kepentingan dan negara yang memiliki orientasi Marxis adalah yang lebih dulu menyadari relevansi dari kerjasama internasional di bidang ideology, dan juga memanfaatkannya (Kusumohamidjojo, 1987: 92-100).

Yang menjadi masalah dalam kedaulatan dan kerjasama internasional adalah sejauh mana keterikatan dalam kerjasama tersebut diwujudkan dan sejauh mana kedaulatan itu dapat dikorbankan oleh masing-masing negara, karena tujuan utama dari kerjasama internasional itu sendiri untuk mewujudkan kepentingan nasional. Kerjasama terbagi atas tiga tingkatan, antara lain:

**1. Konsensus,** yaitu suatu tingkat kerjasama yang ditandai oleh sejumlah ketidakhirauan kepentingan diantara negara-negara yang terlibat dan tanpa keterlibatan yang tinggi diantara negara-negara yang terlibat tersebut.

**2. Kolaborasi**, yaitu suatu tingkat kerjasama yang lebih tinggi dari konsensus. Ditandai oleh sejumlah besar kesamaan tujuan, yang ditandai pula oleh saling keterlibatan yang aktif diantara negara-negara yang terlibat. Keuntungan didapat dalam kolaborasi ini dinilai pula sebagai hasil kerjasama.

**3. Integrasi,** Kerjasama ini ditandai oleh tingkat kedekatan dan keharmonisan yang sangat tinggi diantara negara-negara yang terlibat didalamnya. Dalam kerjasama ini hampir mustahil pula ditemukan kepentingan yang berbenturan diantara negara-negara yang terlibat. (Smith dan Hocking, 1990: 222).

Kerjasama internasional dalam masyarakat internasional merupakan keharusan sebagai akibat dari adanya hubungan interdepedensi (saling ketergantungan) dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional. Untuk mewujudkan kerjasama internasional terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya, baik faktor pendorong maupun factor penghambat terwujudnya kerjasama tersebut.

Praktek kerjasama internasional di dalam masyarakat internasional dapat dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor, yaitu:

1. Faktor yang mendorong kerjasama internasional, terdiri dari:

* 1. kemajuan teknologi yang dapat menghilangkan rintangan dan perbedaan antar bangsa, seperti alat transportasi modern serta alat komunikasi yang memungkinkan hubungan antarbangsa lebih cepat dan singkat.
	2. Kemajuan dan perkembangan ekonomi
	3. Perubahan sifat peperangan, dimana suatu negara tidak dapat lagi menyisihkan diri atau terlepas dari atau terlepas dari bahaya peperangan.

2. Faktor yang menghambat, terdiri dari:

* 1. Kedaulatan negara, yang dapat menimbulkan persoalan sampai berapa jauh negara-negara bersedia membatasi diri dan menyerahkan sebagian kebebasan bertindaknya
	2. Kepentingan nasional, yakni jika terjadi persaingan atau benturan antar kepentingan nasional negara-negara yang bekerjasama
	3. Nasionalisme, yaitu rasa kebangsaan berlebih sehingga meremehkan bangsa lain. Selain itu, masih ada faktor yang turut mempengaruhi kerjasama internasional, yaitu adanya perbedaan ideologi, ekonomi, kultural, luas daerah, kepadatan penduduk, sistem pemerintahan dan lain-lain (Kartasasmita, 1987: 22-27).

Menurut T. May Rudi dalam bukunya Study Strategis : Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin:

**“Kerjasama Bilateral adalah sebuah sebuah kerjasama yang terbentuk dari berbagai komitmen individu untuk mencapai kesejahteraan secara kolektif yang merupakan hasil dari adanya persamaan kepentingan” (2003:5)**

Dalam proses pelaksanaan Kerjasama Bilateral Spiegel menyatakan bahwa dapat ditemukan tiga motif:

**1. Memelihara Kepentingan Nasional**

**2. Memelihara Perdamaian**

**3. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi.** (Spiegel, 1995:67)

Interaksi merupakan inti dari Hubungan Internasional. Dibalik suatu interaksi tentu ada kepentingan yang menyebabkan atau menjadi alasan interaksi tersebut. Negara sebagai aktor utama dalam Hubungan Internasional, juga memiliki kepentingan yang menjadi alasan mereka dalam melaksanakan hubungan internasional dengan negara lain. Tentunya, ada beberapa kepentingan yang menjadi alasan dalam melaksanakan hubungan internasional dengan negara lain yaitu, kepentingan nasional (National Interest) dan kekuasaan nasional (National Power).

Morgenthau dalam bukunya *Politics Among Nations*, berpendapat bahwa :

**Kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendaIiansuatu negara atas negam lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerja sama.**(Morgenthau, 1978)

Perbatasan secara umum adalah garis demarkasi antara dua negara yang berdaulat. Perbatasan sebuah negara atau *states* border dibentuk dengan lahirnya negara itu sendiri. Sebelum munculnya negara, penduduk yang tinggal di wilayah tertentu tidak merasakan perbedaan, bahkan tidak jarang mereka berasal dari etnis yang sama, namun dengan munculnya negara mereka terpisahkan dan dengan adanya tuntutan negara itu mereka mempunyai kewarnegaraan yang berbeda. (Hadiwijoyo, 2018:23)

Perbatasan dibedakan menjadi 2 yaitu, *boundaries & frontier.* Kedua definisi ini mempunyai arti dan makna yang berbeda meskipun kedunya saling melengkapi dan mempunyai nilai yang strategis bagi kedaulatan wilayah negara.

Kristof dalam tulisannya yang berjudul *The Nature of Frontiers and Boundaries* membedakan *boundaries* dan *frontier* sebagai berikut :

***Frontier* mempunyai orientasi keluar, sedangkan boundaries lebih berorientasi ke dalam. *Frontier* merupakan suatu faktor integrasi antara negara-negara tersebut di satu pihak, sedangkan boundaries merupakan suatu faktor pemisah. *Boundaries* berupa suatu zona transisi antara suasana kehidupan yang berlainan, yang juga mencerminkan kekuatan-kekuatan yang saling berlawanan dari negara yang saling berbatasan. Sedangkan *frontier* masih memungkinkan terjadinya saling interpenetrasi pengaruh antar dua negara yang berbatasan/bertetangga**.(Kristof dalam Hadiwijoyo, 2018:25)

Suryo sakti hadiwijoyo juga dalam bukunya *Politik perbatasan negara Indonesia dan The oustanding boundary problems* menjelaskan wilayah perbatasan sebagai berikut :

**Wilayah geografis yang berhadapan dengan negara tetangga, yang mana penduduk yang bermukim di wilayah tersebut disatukan melalui hubungan sosial-ekonomi dan sosial-budaya setelah ada kesepakatan antarnegara yang berbatasan.**(Hadiwijoyo, 2018:26)

Dalam kasus masalah Sungai Simantipal, malaysia mengklaim secara sepihak bahwa dalam persetujuan 1915 bermuara di sebelah utara titik koordinat 4ᵒ20`LU.(Hadiwijoyo, 2018). Klaim sepihak yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia dirasakan tidak sesuai dengan esensi yang terkandung dalam Konvesi 1891, yang menjadikan batas-batas kedua Negara sebagai batas alamiah, yakni gunung, tepi kanan sungai dan garis lurus. Hal tersebut berarti apabila di wilayah tersebut terdapat gunung, maka batas wilayah berupa punggung gunung. Sedangkan apabila tidak dijumpai punggung gunung, maka batas wilayah berupa tepi kanan sungai. Namun apabila tepi kanan sungai juga tidak dijumpai, maka penentuan batas adalah dengan menggunakan garis lurus yang menghubungkan tugu-tugu batas atau dengan batas alam yang sudah diketahui posisi pastinya.

Perbatasan Sungai Simantipal terletak pada Kabupaten Nunukan Kecamatan Lumbis Ogong, Kalimantan Utara dan berbatasan dengan Tawau, Sabah, Malaysia.

Indonesia – Malaysia memiliki total 9 masalah perbatasan sampai September 2018, dan pada Oktober 2018, Indonesia – Malaysia mengadakan *forum bilateral Joint Indonesia-Malaysia Committee (*JIM*)* ke 42 untuk kembali membahas tentang tapal batas kedua negara, hasil dari JIM tersebut adalah selesainya 2 sengketa permasalahan, yaitu titik Simantipal dan titik C500-600, MoU-nya pun sudah ditanda tangani pada tanggal 10 Oktober 2018. Untuk kemudian Indonesia – Malaysia akan melakukan JIM ke 43 tahun 2020 untuk menyelesaikan 7 masalah perbatasan lainnya yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah perbatasan Indonesia – Malaysia secara keseluruhan.

**C. Hipotesis Penelitian**

 Berdasarkan kerangka teoritis, perumusan masalah, dan uraian lainnya diatas, maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut: **Dengan Adanya Joint Indonesia – Malaysia Committee (JIM), Maka permasalahan perbatasan Indonesia – Malaysia di wilayah Sungai Simantipal dapat diselesaikan.**

**D. Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel | Indikator | Verifikasi Data |
| 1. Dengan Adanya Joint Indonesia – Malaysia Committee (JIM) dapat | 1. Adanya pembentukan *forum bilateral Joint Indonesia-Malaysia Committee (JIM)*2. Terbentuknya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) | 1. Adanya *forum bilateral Joint Indonesia-Malaysia Committee (JIM)* untuk membahas tapal batas Indonesia- Malaysia.Sumber:<http://www.koran-jakarta.com/ri-malaysia-bahas-tapal-batas-negara/>2. Adanya BNPP sebagai keseriusan pemerintah dalam menangani kawasan perbatasanSumber:[https://www.timesindonesia.co.id/ read/182276/20180907/203700/begini-proses-terbentuknya-badan-nasional-pengelola-perbatasan-indonesia/](https://www.timesindonesia.co.id/%20read/182276/20180907/203700/begini-proses-terbentuknya-badan-nasional-pengelola-perbatasan-indonesia/) |
| 2. Maka permasalahan perbatasan Indonesia – Malaysia di wilayah Sungai Simantipal dapat diselesaikan | 1. *MoU forum bilateral Joint Indonesia-Malaysia Committee (JIM) on Demarcation and Survey of International Boundary*Usaha diplomasi dalam penyelesaian perbatasan di Indonesia- Malaysia2. Terbentuknya pos lintas batas | 1. Penanda tanganan *MoU forum bilateral Joint Indonesia-Malaysia Committee (JIM) on Demarcation and Survey of International Boundary* pada tanggal 10 Oktober 2018 Sumber:<https://www.kemendagri.go.id/> blog/28287-Hasil-Kesepakatan-JIM-Wujud-Komitmen-Indonesia-dan-Malaysia2. Pembuatan pos lintas batasSumber:wilayahperbatasan.com/2017/09/ oleh-harmen-batubara |

**E. Skema Kerangka Teoritis**

Malaysia

Indonesia

Permasalahan di wilayah Perbatasan

*Positional Dispute*

*Territorial Dispute*

*Transboundary Resource Dispute*

*Transboundary Resource Dispute*

Upaya Penyelesaian Masalah Perbatasan Kedua Negara

*forum bilateral Joint Indonesia-Malaysia Committee (JIM) on Demarcation and Survey of International Boundary*

Penanda tanganan MoU *forum bilateral Joint Indonesia-Malaysia Committee (JIM) on Demarcation and Survey of International Boundary*

Terselesaikannya Masalah Perbatasan di Sungai Simantipal